

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SMAN 1 LAMPIHONG KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN

Siti Tiara Nabella¹, Reno Affrian², Herry Febriadi³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: Sititieranabella@gmail.com¹, Renoaffrian@gmail.com², Harryfebriadi@gmail.com³

ABSTRAK

Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong ditemukan beberapa fenomena, di antaranya kurang tepatnya sasaran dan ketidakmertaan dalam pemberian bantuan, penggunaan dana yang masih belum efektif, dan tingkat aksebelitas penerima, serta ketidaktepatan penyaluran bantuan. Berdasarkan pernyataan beberapa fenomena tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong, serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Data yang telah didapat diuji kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong tergolong cukup baik. Dari segi komunikasi, kejelasan, proses, dan konsistensi informasi dikategorikan baik. Sumber daya menunjukkan fasilitas dan informasi mendukung, namun jumlah staf masih kurang. Disposisi pelaksana, seperti sikap dan komitmen, dinilai baik. Struktur birokrasi masih terkendala pada ketersediaan staf, meskipun keahlian dan kewenangan pelaksana baik. Faktor pendorong implementasi mencakup informasi yang jelas, fasilitas memadai, dan sikap pelaksana yang cekatan. Adapun hambatan utamanya adalah keterbatasan jumlah serta kapasitas staf pelaksana. Kepala SMAN 1 Lampihong disarankan mengambil langkah strategis untuk menambah staf pengelola PIP melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan, serta memberikan pelatihan agar pelaksanaan program lebih efektif. Pengelola PIP diharapkan aktif berkoordinasi dan meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan atau diskusi. Orang tua siswa penerima PIP sebaiknya menggunakan bantuan secara bijak untuk kebutuhan pendidikan anak. Siswa penerima PIP pun diharapkan memanfaatkan bantuan dengan tanggung jawab dan tepat guna, serta menjadikannya sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi dan menunjukkan sikap positif di sekolah maupun di luar.

Kata Kunci: Implementasi dan Program Indonesia Pintar (PIP).

ABSTRACT

The implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) at SMAN 1 Lampihong found several phenomena, including the inaccuracy of targets and inequality in providing assistance, the use of funds that are still ineffective, and the level of accessibility of recipients, as well as the inaccuracy of distribution of assistance. Based on the statements of several phenomena, the purpose of this study is to determine the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) at SMAN 1 Lampihong, as well as the factors that influence it. This study uses a descriptive-qualitative type. The data sources in this study were 7 people. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observations, and documentation. The data analysis techniques used data reduction, data display, and data verification. The data that had been obtained was tested for data credibility through extended observations, increased perseverance in research, triangulation, peer discussions,

negative case analysis and member checks. The results of the study showed that the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) policy at SMAN 1 Lampihong was quite good. In terms of communication, clarity, process, and consistency of information were categorized as good. Resources showed supporting facilities and information, but the number of staff was still lacking. The disposition of the implementers, such as attitudes and commitments, was considered good. The bureaucratic structure was still constrained by the availability of staff, although the expertise and authority of the implementers were good. The driving factors for implementation included clear information, adequate facilities, and agile attitudes of the implementers. The main obstacle was the limited number and capacity of the implementing staff. The principal of SMAN 1 Lampihong was advised to take strategic steps to increase the number of PIP management staff through coordination with the Education Office, and to provide training so that the implementation of the program was more effective. PIP managers are expected to actively coordinate and improve their own capacity through training or discussions. Parents of PIP recipients should use assistance wisely for their children's educational needs. Students receiving PIP are also expected to use the assistance responsibly and appropriately, and use it as motivation to improve their achievements and demonstrate a positive attitude at school and outside.

Keywords: *Implementation and Smart Indonesia Program (PIP).*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab negara untuk memfasilitasinya secara merata. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) ditegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Namun, dalam praktiknya masih banyak anak usia sekolah yang menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan secara optimal, terutama disebabkan oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan, salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan untuk mencegah siswa dari putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan (Kemdikbud, 2020).

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program prioritas nasional yang diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu, yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta siswa dengan kondisi khusus lainnya. Bantuan ini berupa dana tunai yang ditransfer langsung kepada siswa melalui rekening yang telah disediakan, untuk keperluan pendidikan seperti pembelian perlengkapan sekolah, biaya transportasi, maupun kebutuhan penunjang lainnya (Kementerian Keuangan, 2021). PIP diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam membantu peserta didik tetap melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA/SMK.

Di SMAN 1 Lampihong, implementasi Program Indonesia Pintar menjadi hal yang penting untuk dikaji, mengingat sekolah ini berada di wilayah yang sebagian siswanya berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Keberhasilan pelaksanaan program ini tentu tidak hanya dilihat dari aspek penyaluran dana, tetapi juga pada bagaimana mekanisme pelaksanaan, peran sekolah dalam mendata calon penerima, serta efektivitas pemanfaatan dana oleh peserta didik. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan kendala seperti keterlambatan pencairan, kurangnya pemahaman orang tua, hingga masalah teknis administrasi (Ritonga, 2021).

Selain itu, efektivitas program ini sangat bergantung pada sinergi antara sekolah, orang tua, dan pihak pemerintah. Sekolah berperan penting dalam melakukan sosialisasi, pengumpulan data yang akurat, dan pendampingan terhadap siswa penerima PIP. Jika pelaksanaannya tidak maksimal, maka program yang sejatinya ditujukan untuk menurunkan angka putus sekolah justru tidak mencapai sasarannya secara optimal (Sari, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi PIP di SMAN 1 Lampihong, termasuk hambatan dan solusi yang diterapkan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam dan selanjutnya akan dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul:

“Implementasi Program Indonesia Pintar di SMAN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan”.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Data yang telah didapat diuji kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

a. Komunikasi

1) Kejelasan Informasi yang Disampaikan

Kejelasan informasi mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan baik. Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana kejelasan informasi yang disampaikan merujuk pada sejauh mana suatu pesan atau data dapat dipahami dengan mudah dan tepat oleh penerima informasi. Dalam konteks ini, kejelasan mencakup penggunaan bahasa yang sederhana, struktur informasi yang sistematis, serta penyampaian yang tidak membingungkan atau menimbulkan interpretasi ganda. Kejelasan informasi sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan komunikasi tercapai, penerima memahami isi pesan secara akurat, dan dapat mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai berdasarkan informasi tersebut.

2) Transmisi

Proses transmisi informasi tentang pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan baik. Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana transmisi adalah proses penyampaian atau pengalihan informasi, pesan, atau data dari satu pihak ke pihak lain melalui berbagai media atau saluran komunikasi. Dalam konteks kelembagaan atau pendidikan, transmisi mencakup cara sekolah menyebarkan informasi kepada siswa, orang tua, dan pihak terkait, baik secara lisan, tertulis, maupun digital. Efektivitas transmisi sangat dipengaruhi oleh kejelasan pesan, kecepatan penyampaian, serta ketepatan saluran komunikasi yang digunakan agar informasi diterima secara utuh dan tepat sasaran.

3) Konsisten Penyampaian Informasi

Konsistensi penyampaian informasi terkait Program Indonesia Pintar (PIP) kepada penerima manfaat di SMAN 1 Lampihong dikategorikan baik. Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana konsistensi penyampaian informasi merujuk pada keseragaman dan keberlanjutan dalam menyampaikan pesan atau data kepada penerima informasi dalam berbagai waktu dan kesempatan. Hal ini mencakup penggunaan bahasa, format, dan isi yang tetap serta tidak berubah-ubah, sehingga penerima memperoleh pemahaman yang stabil dan tidak membingungkan. Dalam konteks pendidikan, konsistensi penting untuk membangun kepercayaan, menghindari kesalahpahaman, dan memastikan bahwa seluruh pihak mendapatkan informasi yang sama secara berkelanjutan.

b. Sumber Daya

1) Jumlah Staf Keahlian dari Pelaksana

Jumlah staf pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan belum baik. Hal tersebut belum sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana jumlah staf dan keahlian dari pelaksana

merujuk pada kuantitas personel serta tingkat kompetensi yang dimiliki oleh individu-individu yang bertugas dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan. Dalam konteks pelaksanaan program di lingkungan sekolah, jumlah staf yang mencukupi serta memiliki keahlian yang relevan sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Keahlian tersebut mencakup pengetahuan teknis, keterampilan administratif, dan kemampuan komunikasi yang dibutuhkan agar program dapat berjalan sesuai prosedur dan mencapai tujuan yang diharapkan.

2) Fasilitas-Fasilitas yang Mendukung

Fasilitas-fasilitas yang tersedia di SMAN 1 Lampihong yang mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dikategorikan baik. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana fasilitas-fasilitas yang mendukung merujuk pada segala bentuk sarana dan prasarana yang tersedia untuk membantu kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Dalam lingkungan pendidikan, fasilitas ini mencakup ruang kerja, perangkat komputer, akses internet, perangkat lunak, serta alat komunikasi yang memadai. Keberadaan fasilitas yang lengkap dan berfungsi baik sangat berpengaruh terhadap efisiensi kerja, akurasi administrasi, dan kenyamanan dalam pelaksanaan program, sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara optimal.

3) Informasi

Informasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan baik. Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana informasi adalah kumpulan data atau pesan yang telah diolah dan disusun sedemikian rupa sehingga memiliki makna dan dapat digunakan oleh penerima untuk memahami suatu keadaan, mengambil keputusan, atau melakukan tindakan tertentu. Informasi yang baik bersifat akurat, relevan, jelas, dan dapat dipercaya. Dalam konteks kelembagaan, informasi berperan penting sebagai dasar komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga proses kerja dapat berjalan secara terarah dan efisien.

c. Disposisi atau Sikap

1) Sikap dari Pelaksana

Sikap para pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dikategorikan baik. Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana sikap dari pelaksana merujuk pada perilaku, tanggapan, dan cara individu menjalankan tugas serta berinteraksi dalam proses pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap keberhasilan program yang dijalankan. Dalam konteks pelaksanaan program di sekolah, sikap pelaksana yang positif seperti ramah, responsif, dan proaktif akan menciptakan suasana kerja yang kondusif serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan dari pihak penerima manfaat.

2) Komitmen dari Pelaksana

Komitmen para pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) SLTA di SMAN 1 Lampihong tercermin dalam proses pelaksanaan program dikategorikan baik. Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana komitmen dari pelaksana adalah bentuk kesungguhan, tanggung jawab, dan dedikasi yang ditunjukkan oleh individu atau tim dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan suatu program atau kegiatan. Komitmen tercermin melalui konsistensi tindakan, ketepatan waktu, dan kesediaan untuk menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik meskipun menghadapi tantangan. Dalam konteks pelaksanaan program di sekolah, komitmen pelaksana menjadi kunci keberhasilan karena menunjukkan sejauh mana mereka serius dan peduli terhadap pencapaian tujuan serta pelayanan kepada penerima manfaat.

d. Struktur Birokrasi

1) Staf yang Memadai

Ketersediaan staf pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan belum baik. Hal tersebut belum sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana staf yang memadai merujuk pada jumlah personel yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan secara efektif dan efisien. Selain jumlah, staf yang memadai juga mencakup kualifikasi yang relevan, kemampuan bekerja sama, serta kesiapan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Dalam konteks pendidikan, keberadaan staf yang memadai sangat penting untuk memastikan kelancaran administrasi, pelayanan kepada siswa, dan pencapaian target program, karena setiap peran dapat dijalankan secara optimal tanpa beban kerja yang berlebihan.

2) Keahlian yang Baik untuk Melaksanakan Tugas

Tingkat keahlian staf pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas terkait Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan baik. Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas adalah kemampuan teknis, administratif, dan interpersonal yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif dan profesional. Keahlian ini mencakup pemahaman terhadap prosedur kerja, keterampilan menggunakan alat atau sistem yang relevan, serta kemampuan berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Dalam konteks pelaksanaan program di sekolah, keahlian yang baik memungkinkan pelaksana bekerja dengan cepat, tepat, dan sesuai aturan, sehingga mendukung tercapainya tujuan program secara maksimal.

3) Wewenang yang Memadai

Wewenang yang dimiliki oleh pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan baik. Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana wewenang yang memadai adalah kekuasaan atau hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk mengambil keputusan, melaksanakan tindakan, dan mengatur jalannya suatu kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Wewenang ini harus seimbang dengan tugas yang diberikan agar pelaksana dapat bertindak cepat, tepat, dan mandiri dalam menghadapi situasi di lapangan. Dalam konteks pelaksanaan program di sekolah, wewenang yang memadai memungkinkan pelaksana mengelola program secara efektif, menyelesaikan masalah dengan cepat, dan berkoordinasi dengan pihak terkait tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabuapten Balangan

a. Faktor Pendorong

1) Informasi Program Indonesia Pintar (PIP) Jelas

Kejelasan informasi mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan baik. Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana kejelasan informasi yang disampaikan merujuk pada sejauh mana suatu pesan atau data dapat dipahami dengan mudah dan tepat oleh penerima informasi. Dalam konteks ini, kejelasan mencakup penggunaan bahasa yang sederhana, struktur informasi yang sistematis, serta penyampaian yang tidak membingungkan atau menimbulkan interpretasi ganda. Kejelasan informasi sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan komunikasi tercapai, penerima memahami isi pesan secara akurat, dan dapat mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai berdasarkan informasi tersebut.

2) Komunikasi/Pesan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) Jelas

Proses transmisi informasi tentang pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan baik. Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi

George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana transmisi adalah proses penyampaian atau pengalihan informasi, pesan, atau data dari satu pihak ke pihak lain melalui berbagai media atau saluran komunikasi. Dalam konteks kelembagaan atau pendidikan, transmisi mencakup cara sekolah menyebarkan informasi kepada siswa, orang tua, dan pihak terkait, baik secara lisan, tertulis, maupun digital. Efektivitas transmisi sangat dipengaruhi oleh kejelasan pesan, kecepatan penyampaian, serta ketepatan saluran komunikasi yang digunakan agar informasi diterima secara utuh dan tepat sasaran.

3) Informasi Program Indonesia Pintar (PIP) Konsisten Disampaikan

Konsistensi penyampaian informasi terkait Program Indonesia Pintar (PIP) kepada penerima manfaat di SMAN 1 Lampihong dikategorikan baik. Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana konsistensi penyampaian informasi merujuk pada keseragaman dan keberlanjutan dalam menyampaikan pesan atau data kepada penerima informasi dalam berbagai waktu dan kesempatan. Hal ini mencakup penggunaan bahasa, format, dan isi yang tetap serta tidak berubah-ubah, sehingga penerima memperoleh pemahaman yang stabil dan tidak membingungkan. Dalam konteks pendidikan, konsistensi penting untuk membangun kepercayaan, menghindari kesalahpahaman, dan memastikan bahwa seluruh pihak mendapatkan informasi yang sama secara berkelanjutan.

4) Fasilitas yang Dimiliki Mendukung Program Indonesia Pintar (PIP)

Fasilitas-fasilitas yang tersedia di SMAN 1 Lampihong yang mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dikategorikan baik. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana fasilitas-fasilitas yang mendukung merujuk pada segala bentuk sarana dan prasarana yang tersedia untuk membantu kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Dalam lingkungan pendidikan, fasilitas ini mencakup ruang kerja, perangkat komputer, akses internet, perangkat lunak, serta alat komunikasi yang memadai. Keberadaan fasilitas yang lengkap dan berfungsi baik sangat berpengaruh terhadap efisiensi kerja, akurasi administrasi, dan kenyamanan dalam pelaksanaan program, sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara optimal.

5) Informasi Program Indonesia Pintar (PIP) Terbuka dan Transfaran

Informasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan baik. Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana informasi adalah kumpulan data atau pesan yang telah diolah dan disusun sedemikian rupa sehingga memiliki makna dan dapat digunakan oleh penerima untuk memahami suatu keadaan, mengambil keputusan, atau melakukan tindakan tertentu. Informasi yang baik bersifat akurat, relevan, jelas, dan dapat dipercaya. Dalam konteks kelembagaan, informasi berperan penting sebagai dasar komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga proses kerja dapat berjalan secara terarah dan efisien.

6) Sikap dari Pelaksana Cekatan dan Tanggap

Sikap para pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dikategorikan baik. Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana sikap dari pelaksana merujuk pada perilaku, tanggapan, dan cara individu menjalankan tugas serta berinteraksi dalam proses pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap keberhasilan program yang dijalankan. Dalam konteks pelaksanaan program di sekolah, sikap pelaksana yang positif seperti ramah, responsif, dan proaktif akan menciptakan suasana kerja yang kondusif serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan dari pihak penerima manfaat.

7) Komitmen dari Pelaksana Baik

Komitmen para pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong tercermin dalam proses pelaksanaan program dikategorikan baik. Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana komitmen dari

pelaksana adalah bentuk kesungguhan, tanggung jawab, dan dedikasi yang ditunjukkan oleh individu atau tim dalam menjalankan tugas dan menyukseskan suatu program atau kegiatan. Komitmen tercermin melalui konsistensi tindakan, ketepatan waktu, dan kesediaan untuk menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik meskipun menghadapi tantangan. Dalam konteks pelaksanaan program di sekolah, komitmen pelaksana menjadi kunci keberhasilan karena menunjukkan sejauh mana mereka serius dan peduli terhadap pencapaian tujuan serta pelayanan kepada penerima manfaat.

8) Keahlian Pengelola Baik dalam Melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP)

Tingkat keahlian staf pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas terkait Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan baik. Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), dimana keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas adalah kemampuan teknis, administratif, dan interpersonal yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif dan profesional. Keahlian ini mencakup pemahaman terhadap prosedur kerja, keterampilan menggunakan alat atau sistem yang relevan, serta kemampuan berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Dalam konteks pelaksanaan program di sekolah, keahlian yang baik memungkinkan pelaksana bekerja dengan cepat, tepat, dan sesuai aturan, sehingga mendukung tercapainya tujuan program secara maksimal.

9) Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) Melaksanakan Wewenangnya dengan Baik

Wewenang yang dimiliki oleh pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana diberikan keleluasaan yang cukup dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk dalam mengambil keputusan, melaksanakan tindakan, dan mengatur pelaksanaan program sesuai dengan tanggung jawabnya. Kondisi ini sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63–69), yang menekankan bahwa wewenang yang memadai merupakan elemen penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Wewenang yang cukup memungkinkan pelaksana untuk bertindak cepat dan mandiri, tanpa harus terus-menerus menunggu instruksi dari pihak yang lebih tinggi.

Dalam konteks pelaksanaan program di sekolah, wewenang yang memadai sangat penting untuk menghindari hambatan birokrasi yang dapat memperlambat proses. Pelaksana PIP yang memiliki otoritas yang jelas dapat mengelola program secara lebih efisien, mulai dari verifikasi data siswa, koordinasi dengan wali kelas dan orang tua, hingga proses penyaluran bantuan. Selain itu, wewenang ini juga memungkinkan pelaksana untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan secara tepat waktu, tanpa harus mengalami tumpang tindih kewenangan atau keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan lancar dan tujuan PIP untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu dapat tercapai secara maksimal.

b. Faktor Penghambat

1) Jumlah Staf Terbatas

Jumlah staf pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan belum baik, yang artinya belum memenuhi kebutuhan ideal dalam mendukung kelancaran program tersebut. Keadaan ini berdampak pada keterbatasan dalam pelaksanaan berbagai tugas administratif maupun teknis yang menyertai program PIP. Ketika jumlah staf tidak seimbang dengan beban kerja yang ada, maka besar kemungkinan akan terjadi keterlambatan, ketidaktepatan data, hingga kesalahan dalam proses verifikasi dan distribusi bantuan kepada siswa.

Permasalahan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan oleh George Edward III (dalam Kadji, 2015:63–69), yang menekankan bahwa jumlah staf dan tingkat keahlian pelaksana menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu

program. Dalam konteks ini, kuantitas personel yang memadai harus diiringi dengan kompetensi yang relevan. Artinya, tidak hanya jumlah staf yang cukup, tetapi juga staf yang menguasai bidang pekerjaannya. Pengetahuan tentang prosedur teknis PIP, keterampilan dalam pengelolaan data, serta pemahaman terhadap kebijakan pendidikan adalah hal-hal penting yang harus dimiliki oleh para pelaksana.

Dalam pelaksanaan program di lingkungan sekolah, keberadaan staf yang kompeten akan sangat menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Keahlian yang dibutuhkan tidak hanya terbatas pada kemampuan administratif, tetapi juga mencakup kemampuan komunikasi yang baik dengan siswa, orang tua, dan pihak luar yang terkait. Tanpa kombinasi antara jumlah staf yang memadai dan keahlian yang sesuai, pelaksanaan Program Indonesia Pintar dapat mengalami kendala yang berdampak pada kurang optimalnya pencapaian tujuan, yakni memastikan bahwa bantuan pendidikan tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh peserta didik yang berhak.

2) Staf yang Ada Belum Memadai

Ketersediaan staf pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan belum baik, yang berarti jumlah personel yang terlibat dalam pelaksanaan program ini masih belum mencukupi kebutuhan ideal. Hal ini berdampak langsung pada proses pelaksanaan program yang seharusnya berjalan secara sistematis dan tepat waktu. Ketika jumlah staf tidak sebanding dengan beban kerja yang ada, maka berbagai kendala administratif maupun teknis dapat muncul, seperti keterlambatan dalam proses verifikasi data, kurangnya pendampingan kepada siswa penerima bantuan, hingga potensi kesalahan dalam distribusi program.

Kondisi tersebut belum sejalan dengan teori Implementasi George Edward III (dalam Kadji, 2015:63-69), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan staf yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Menurut teori ini, staf yang memadai mencakup jumlah personel yang cukup serta memiliki kualifikasi yang sesuai untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program. Dalam hal ini, bukan hanya keberadaan staf secara fisik yang penting, tetapi juga kompetensi mereka, seperti pemahaman terhadap prosedur program PIP, kemampuan teknis dalam pengelolaan data, serta keterampilan administratif yang mendukung jalannya program secara efisien.

Lebih dari itu, kualifikasi staf pelaksana yang memadai juga mencakup kemampuan bekerja sama dalam tim, komunikasi yang efektif, serta kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Dalam konteks pendidikan, keberadaan staf yang profesional sangat penting untuk memastikan kelancaran administrasi, pelayanan kepada siswa, serta pencapaian target program. Setiap individu dalam tim pelaksana harus mampu menjalankan peran masing-masing dengan optimal agar tidak terjadi penumpukan tugas atau kesalahan akibat beban kerja yang tidak proporsional. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kompetensi staf pelaksana perlu menjadi perhatian serius bagi pihak sekolah dan instansi terkait agar implementasi Program Indonesia Pintar dapat berjalan maksimal.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan, bahwa:

1. Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan cukup terimplementasi; Pertama; Komunikasi; 1) Kejelasan informasi mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan baik. 2) Proses transmisi informasi tentang pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan baik. 3) Konsistensi penyampaian informasi terkait Program Indonesia Pintar (PIP) kepada penerima manfaat di SMAN 1 Lampihong

- dikategorikan baik. Kedua; Sumber daya; 1) Jumlah staf pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan belum baik. 2) Fasilitas-fasilitas yang tersedia di SMAN 1 Lampihong yang mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dikategorikan baik. 3) Informasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan baik. Ketiga; Disposisi atau Sikap; 1) Sikap para pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dikategorikan baik. 2) Komitmen para pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong tercermin dalam proses pelaksanaan program dikategorikan baik. Keempat; Struktur Birokrasi; 1) Ketersediaan staf pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan belum baik. 2) Tingkat keahlian staf pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas terkait Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan baik. 3) Wewenang yang dimiliki oleh pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong dikategorikan baik.
2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupten Balangan; Pertama; Faktor Pendorong, seperti; 1) Informasi Program Indonesia Pintar (PIP) Jelas. 2) Komunikasi/Pesan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) Jelas. 3) Informasi Program Indonesia Pintar (PIP) Konsisten Disampaikan. 4) Fasilitas yang Dimiliki Mendukung Program Indonesia Pintar (PIP). 5) Informasi Program Indonesia Pintar (PIP) Terbuka dan Transfaran. 6) Sikap dari Pelaksana Cekatan dan Tanggap. 7) Komitmen dari Pelaksana Baik. 8) Keahlian Pengelola Baik dalam Melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP). 9) Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) Melaksanakan Wewengangnya dengan Baik. Kedua; Faktor Penghambat, seperti; jumlah staf terbatas dan staf yang ada belum memadai.(Affrian, 2025; Hidayatullah and Mahpuzah, 2025; Setiawan, 2025)

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Angara, A. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Firdaus, I. (2019). *Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang* (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Hamdi, M. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Karso, A. J. (2021). *Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik: Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia*. Makassar: Insania Press.
- Kartawidjaja, H. A. D. (2018). *Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. Bandung: Alfabeta.
- Marawiyah. (2024). *Implementasi Kebijakan Publik: Buku Ajar*. Jakarta: Media Indonesia.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.
- Permendikbud Nomor 9 Tahun 2018, Diubah dengan Pemendikbud Nomor 10 Tahun 2020.
- Affrian, R. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.
- Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.
- Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.
- Rostyaningsih, dkk., (2018). *Pembelajaran tematik integratif untuk menumbuhkan karakter siswa*



sekolah dasar. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.

Septiyani, Ane. (2020). *Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Sebelas April Sumedang.

Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: Sah Media.

Subarsono, A. G. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.



- Syahrudin, A. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusamedia.
- Ufilah, Ulfah. (2020). *Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP 1 Kelua Kabupaten Tabalong*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Program Studi Adminsitasi Publik.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi: Teori, proses, dan studi kasus komparatif*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service (CAPS).
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskriptif dalam ilmu komunikasi. *Jurnal Diakom*, Vol. 1, No. 2.